

KEMENANGAN PETAHANANA DAN DEMOKRASI LOKAL DALAM PILKADA KABUPATEN KUPANG TAHUN 2013

Rex Tiran*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan kemenangan calon petahana pada pemilukada Kabupaten Kupang tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teori Demokrasi Lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi yang diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk dapat merumuskan berbagai program kerja yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan masyarakat setempat demi kemajuan pembangunan daerah. Desentralisasi memberikan kontribusi dalam penguatan demokrasi lokal sehingga keterlibatan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel serta responsif. Kemenangan petahana dapat dilihat sebagai kuatnya kepercayaan public terhadap kinerja petahana yang hanya dapat diwujudkan melalui implementasi desentralisasi agar tidak menciderai prinsip-prinsip demokrasi.

Kata Kunci: Kemenangan Petahana, Demokrasi Lokal, Desentralisasi.

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Email: tiranrex29@gmail.com

VICTORY OF INCUMBENT AND DEMOCRACY IN LOCAL ELECTION DISTRICT KUPANG 2013

Rex Tiran *

Abstract

This study explains the victory of incumbent candidates in the election Kupang district in 2013. This study used a qualitative method of primary data and secondary data. The theory used in this research are Local Democracy Theory. These results indicate that the implementation of the decentralization embodied in the policy of regional autonomy, giving authority to the head of the region to formulate various work programs adapted to the context of the needs of local communities for the sustainable development area. Decentralization contributes to the strengthening of local democracy so that community involvement a major prerequisite in realizing the performance of local government accountable and responsibility.

Keywords: Victory Of Incumbent, Local Democracy, Decentralization.

* Students of the Master Program in Political Science Faculty of Social and Political Sciences
Airlangga University. Email: tiranrex29@gmail.com

Pendahuluan

Demokrasi lokal di Indonesia ditentukan oleh pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana bagi rakyat di daerah untuk melakukan aktivitas seleksi kepemimpinan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui pilkada langsung rakyat dapat langsung menentukan pemimpin daerahnya, sehingga pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kegiatan pilkada dimaksudkan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, dan bupati dan wakil bupati. Peserta dalam pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau non partai politik (*independen*).

Dalam setiap ajang pilkada keberadaan petahana sebagai peserta dalam pilkada sangat diperhitungkan, sebab petahana tentunya adalah orang yang masih memiliki pengaruh dalam suatu daerah pemilihan karena pernah menjadi pemimpin sebelum adanya pilkada berikut. Dengan adanya berbagai peluang bagi petahana untuk terpilih kembali, seringkali petahana salah menggunakan kewenangan yang dimilikinya sehingga berujung pada proses hukum.

Penggunaan fasilitas Negara merupakan modus yang paling sering dilakukan petahana pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada petahana berpotensi besar digunakan untuk kepentingan petahana dalam memenangkan pemilihan. Dengan adanya kewenangan tersebut, sangat memungkinkan bagi petahana untuk membujuk, memengaruhi bahkan memerintah para bawahannya untuk berpihak dan memberikan dukungan untuk kepentingan petahana.¹

Selain itu dapat kita temui dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh petahana selalu dibalut dengan upaya penggalangan massa. Untuk dapat mengetahui bahwa kegiatan kunjungan kerja tersebut tanpa maksud tertentu maka indikatornya adalah membuat perbandingan jumlah kunjungan kerja kepala daerah yang merupakan petahana pada saat mendekati pelaksanaan pilkada dengan kunjungan kerja pada tahun-tahun sebelumnya. Jika hasilnya sama, artinya kegiatan tersebut merupakan rutinitas yang selalu dilakukan selama masa kepemimpinannya. Tetapi jika kegiatan tersebut

¹ Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, 2015, PILKADA (Penuh euforia, Miskin makna), Bestari: Jakarta, Hal. 38-39

menjelang pemilihan lebih banyak, maka hal tersebut merupakan upaya penggalangan dukungan ataupun pencitraan.²

Ada keuntungan tersendiri bagi para petahana seperti yang disebutkan oleh Catherine Needham, mereka bisa melakukan kampanye permanen. Istilah kampanye permanen berarti seorang petahana telah mempersiapkan diri untuk pemilihan jauh hari sebelum lawan-lawannya dengan menggunakan program kerja pemerintah sebagai sarana kampanye secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, satu keunggulan lain yang dimiliki oleh para petahana adalah *brand awareness* yang tinggi. *Brand awareness* adalah kemampuan calon pembeli atau konsumen untuk mengenali maupun mengingat sebuah merek.³

Disisi lain sebuah riset yang dilakukan oleh *The Electoral Research Institute* di Belgia menyatakan bahwa yang menjadi kekuatan utama dalam kemenangan seorang kandidat bahkan seorang calon incumbent adalah konsolidasi sebuah tim sukses (*winning coalition*), partisipasi politik yang berfokus pada kelompok sasaran pemilih, komunikasi politik yang cukup menarik serta peran penguasaan media dalam proses pemasaran kandidat serta pemasaran sebuah kebijakan.⁴

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebenarnya adalah sarana bagi rakyat daerah untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah yang tengah menjabat. Pilkada juga merupakan kesempatan bagi rakyat untuk memberikan hukuman (*punishment*) bagi pemimpin yang dipandang gagal dengan jalan tidak memilihnya kembali sebagai kepala daerah. Sebaliknya bagi pemimpin yang berhasil, rakyat dapat memberikan ganjaran (*reward*) berupa dukungan bagi pemimpin itu agar memimpin daerah lima tahun ke depan. Lewat mekanisme demokrasi ini, kepala daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja jikalau ingin terpilih kembali.⁵

Hal ini berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Hakeem Onapajo dalam jurnal penelitiannya di Nigeria menyimpulkan bahwa kekerasan merupakan strategi

² Ibid., Hal. 40

³ Akhmad Farhan, *Memahami Kemenangan Petahana Dalam Pilkada Dari Sudut Pandang Political Branding*, <http://akhmadfarhan.com/memahami-kemenangan-petahana-dalam-pilkada-dari-sudut-pandang-political-branding/>, diakses pada tanggal 5 agustus 2017 pukul 18.00

⁴ Bruce Bueno dan Alastair Smith, *The Survival Politics* (Penerjemah: Budianto Suratno). Rosdakarya: Bandung, 2005, Hal. 32

⁵Fadil Abidin, Peluang Petahana dalam Pilkada, <http://fadilabidin75.blogspot.co.id/2013/05/peluang-petahana-dalam-pilkada.html>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

yang dimainkan oleh petahana untuk mengintimidasi masyarakat agar menjatuhkan pilihan kepada calon petahana tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa kekerasan pemilu merupakan bentuk khusus kekerasan politik. Hal ini karena kekerasan pemilu, terjadi dalam berbagai bentuk pembunuhan, penculikan, pembakaran, penjarahan, mencuri suara dan serangan bersenjata di pusat-pusat pemungutan suara. Secara khas terjadi selama periode pemilu dan terhubung langsung ke proses pemilihan. Hal ini juga terutama menargetkan para pemilih, kandidat, pemantau pemilu, petugas pemilu, dan media. Dalam hal informasi pemilu yaitu: data pendaftaran, pemungutan suara hasil suara, materi kampanye, fasilitas pemilihan (kotak suara, tempat pemungutan suara) dan pada tahapan pemilihan yaitu: kampanye terbuka, latihan pendidikan pemilih, dan latihan penghitungan suara.⁶

Penggunaan kekerasan dalam kegiatan pemilu di Nigeria sangat mencederai sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, sebagaimana setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan bebas untuk memilih siapa kandidatnya. Di Indonesia, penggunaan kekerasan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas-asas pemilu yang jujur, bersih, bebas dan adil.

Memang, bisa saja kekuasaan diperoleh dengan kekerasan, kemudian, hukum atau norma akan melegitimasi sesudahnya. Namun, kualitas legitimasi itu berpengaruh terhadap ketulusan dukungan warga negara. Kebutuhan akan legitimasi tindakan ini memberi peluang wacana normatif. Orang tidak akan sanggup terus-menerus menghadapi kekerasan dan ketidakpastian. Suatu sistem politik yang rasional, dapat diramalkan dan memperhitungkan manajemen konflik, diperlukan untuk menjamin masa depan yang lebih baik.⁷

Demokrasi tidak hanya menyelenggarakan pemilu secara berkala, tetapi juga perlu didukung oleh penegakan hak asasi manusia, hukum yang berwibawa, kesadaran politik masyarakat secara luas, dan adanya pergantian kekuasaan secara damai.⁸ Pemilu merupakan media di mana kekuasaan dipertahankan (bagi *Incumbent*) atau direbut (bagi *contender*) secara demokratis. Sistem pemilu yang jelas, transparan dan adil (*fair*) bagi setiap peserta pemilu adalah syarat keharusan (*necessary condition*). Sementara

⁶Hakeem Onapajo dalam jurnal penelitiannya, *Violence and Votes in Nigeria 2007: The Dominance of Incumbents in the Use of Violence to Rig Elections*.

⁷ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2014, Hal. 8

⁸ Firmanzah, *Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2013, Hal. xi

kedewasaan para peserta pemilu menuju sistem demokrasi modern adalah syarat kecukupan (*sufficient condition*). Tanpa adanya kedua hal ini maka pemilu hanya akan menghasilkan pemenang tanpa legitimasi.⁹

Memang sistem pemilu dapat dijalankan dengan jelas, transparan dan adil. Namun tanpa adanya kedewasaan peserta pemilu maka hanya akan menghasilkan pemilu yang berakhir dengan konflik. Jika pemilu dijalankan hanya bermodalkan kedewasaan peserta pemilu maka pemilu yang dihasilkan adalah pemenang tanpa legitimasi dan cacat secara hukum. Penggunaan kekerasan pemilu pada masa reformasi di Indonesia tidak akan dibenarkan, karena masyarakat akan bertindak dan Negara melalui aparat keamanan tidak akan tinggal diam untuk membendung kekerasan yang digunakan petahana.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan diatas, pada kenyataannya calon petahana memiliki banyak keuntungan dibandingkan calon pendatang baru. Namun dalam prakteknya seringkali petahana salah menggunakan kewenangannya untuk mengamankan kedudukannya pada pilkada berikutnya. Selain itu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petahana turut menciderai prinsip demokrasi itu sendiri.

Dalam tulisan ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana keuntungan jabatan untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan ataupun penyalahgunaan kewenangan bukanlah cara yang bijak untuk mempertahankan kekuasaan calon petahana. Pengabaian atas dimensi kepentingan publik berpengaruh terhadap ketidakjelasan arah demokrasi. Demokrasi lokal seolah-olah sebatas aturan main yang memfasilitasi adu kekuatan dan kepentingan elit lokal. Berjalannya waktu, banyak orang akan menganggap demokrasi telah gagal dalam membangun relasi untuk menghubungkan pentingnya kontrol publik dan kesetaraan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Khususnya demokrasi lokal di Indonesia, bagi kepala daerah yang dapat menjalankan sistem desentralisasi dengan mengutamakan kepentingan umum dan kebaikan bersama dalam setiap program kerjanya dipastikan dapat memenangkan pemilihan umum tanpa menciderai prinsip-prinsip demokrasi.

Pemilukada Kabupaten Kupang tahun 2013 diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon. Diantara ketujuh pasangan, calon petahana kepala daerah kembali maju bersama

⁹ *Ibid.*, Hal. XXII

pasangannya melalui jalur perseorangan/non parpol. Sedangkan 6 (enam) pasangan calon lainnya diusung oleh gabungan partai politik. Bupati Kabupaten Kupang, Ayub Titu Eki merupakan petahana yang maju pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 dan terpilih kembali untuk memimpin Kabupaten Kupang.

Hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Kupang pada tahun 2013 berlangsung dalam satu putaran dan hasilnya dimenangkan oleh petahana Ayub Titu Eki bersama pasangannya Korinus Masneno dengan jumlah suara 63.229 (44,10%). Pasangan Silvester M. Banfatin dan Anthon M. Natun dengan jumlah suara 23.193 (16,18%). Pasangan Jerry Manafe dan Vinsensius Bureni dengan jumlah suara 20.366 (14,21%). Pasangan Viktor Y. Tiran dan Maria Nuban Saku dengan jumlah suara 19.438 (13,56%). Pasangan Steven Derven Manafe dan Maher Syalal Hasbaz Ora dengan jumlah suara 6.691 (4,67%). Pasangan Alexander Foenay dan Benny R. Ndoenboey dengan jumlah suara 6.662 (4,65%). Terakhir adalah pasangan Melitus Ataupah dan Soemin Kase dengan jumlah suara 3.789 (2,64%).

Kemenangan petahana tidak terlepas dari sistem desentralisasi yang melahirkan kebijakan otonomi daerah, sehingga kinerja kepala daerah selama memimpin Kabupaten Kupang periode 2009-2013 dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap keberhasilan kinerja petahana dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Kupang merupakan prestasi yang turut mendukung keterpilihan kembali petahana di Kabupaten Kupang. Dari penjelasan diatas maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana sistem desentralisasi yang diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah berkontribusi terhadap keterpilihan kembali calon petahana di Kabupaten Kupang tahun 2013. Besar harapan penulis agar setiap calon petahana dalam usaha untuk mempertahankan jabatannya tidak melakukan kecurangan maupun kekerasan tetapi menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.

Demokrasi Lokal

Demokrasi lokal merupakan implikasi dari desentralisasi yang dijalankan di daerah sebagai perwujudan dari proses demokrasi di Indonesia. Kebijakan desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk dapat mengurus rumah tangga pemerintahannya secara mandiri. Berdasarkan asas desentralisasi hubungan rakyat dan pemerintahan daerah berada dalam koridor demokrasi lokal. Pelibatan pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya merupakan keleluasaan yang bertujuan untuk

pengembangkan demokrasi daerah dan pembangunan daerah yang pada gilirannya mengarah pada kesejahteraan rakyat di daerah. Alexis de Tocqueville menyatakan bahwa desentralisasi adalah prasyarat demokratisasi. Karenanya efektifitas demokrasi akan semakin kuat, jika dalam proses demokrasi diikuti dengan desentralisasi, begitu pula efektifitas desentralisasi akan semakin kuat jika ditopang dengan pemberlakuan sistem demokrasi.¹⁰

Demokrasi lokal ditandai dengan pergantian kepemimpinan pada tingkat lokal (daerah) melalui sarana pemilihan kepala daerah. Konsepsinya mengandaikan pemerintah itu dari, oleh dan untuk rakyat. Partisipasi masyarakat merupakan syarat utama terciptanya demokratisasi pada aras lokal. Pilkada secara langsung merupakan manifestasi politik otonomi daerah yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memilih dan berkehendak untuk menentukan siapa pemimpinnya serta merupakan bukti nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Melalui pilkada secara langsung, anggota masyarakat yang memiliki kapabilitas dapat mencalonkan diri baik melalui usungan partai politik ataupun melalui jalur perseorangan.

Hasil yang diharapkan dari kinerja seorang kepala daerah yang dipilih secara langsung adalah pemberian pelayanan publik yang memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.¹¹ Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Oleh karena itu apa yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.¹² Persaingan adalah suatu konsekuensi logis dalam demokrasi, di mana masing-masing kandidat bersaing untuk meyakinkan pemilih

¹⁰ Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah*, Pustaka Eureka & PusDeHAM: Surabaya, 2006, Hal. 27

¹¹ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 193

¹²Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2010, Hal. 179

bahwa partai dan kandidat merekalah yang layak untuk dipilih dan keluar sebagai pemenang dalam pemilu.¹³

Secara ideal, melalui pemilukada langsung maka rakyat di daerah secara independen dapat menentukan pemimpin-pemimpin yang diinginkannya. Konsekwensinya, para pemimpin itu diharapkan dapat merumuskan, membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat daerah.¹⁴

Disamping mekanisme pemilihan langsung akan mendorong lahirnya pemerintahan yang responsif, pilkada langsung menjamin pemerintahan yang terbentuk dan dihasilkan lewat mekanisme tersebut memiliki tingkat legitimasi yang tinggi. Karenanya kualitas pemilihan kepala daerah akan sangat menentukan kualitas legitimasi pemerintahan yang dihasilkan. Makin tinggi kualitas pemilu itu dijalankan, makin tinggi pula legitimasi pemerintahan yang dihasilkan. Makin tinggi legitimasi pemerintahan akan semakin kuat pula kedudukan kepala daerah, sehingga makin memungkinkan pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara lebih efektif.¹⁵

Davey mengidentifikasi beberapa alasan yang menuntut desentralisasi. Pertama, semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kemasyarakatan yang mampu menjangkau seluruh pelosok terpencil yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah lokal. Kedua, pemikiran penyebarluasan pelayanan masyarakat seperti program-program penyediaan pembangunan (*basic needs*) semakin mendapat perhatian masyarakat internasional. Tuntutan desentralisasi juga didasarkan pertimbangan manfaat yang diharapkan dari perencanaan regional yang didasarkan atas pengamatan, penelitian dan kebijaksanaan setempat. Kebijakan desentralisasi merupakan mekanisme untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan individu. Desentralisasi juga diperlukan untuk membuat pemerintah daerah lebih kreatif, efektif dan efisien dalam meningkatkan fungsi-fungsi publik untuk kesejahteraan masyarakat di daerah.¹⁶

Kebijakan desentralisasi dilakukan dengan pendelegasian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan urusan-urusan dasar pelayanan publik sebagai bidang utama

¹³ Firmanzah, *Op., Cit* Hal. xxxviii

¹⁴ Kacung Marijan, *Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Ekonomi dan Demokrasi Lokal*, 2007, Hal. 2

¹⁵ Abubakar Basyarahil, *Desentralisasi, Pilkada Langsung dan Efektifitas Pemerintahan Daerah*, Hal. 19

¹⁶ Zamrud Utami, *Pengaruh desentralisasi*, FE UI, 2010, Hal. 11

yang menjadi prioritas, disertai dengan pelimpahan pembiayaannya melalui alokasi dana yang lebih besar dan lebih leluasa (desentralisasi fiskal). Pendorong penting program desentralisasi adalah bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh otoritas yang memiliki kontrol geografis yang paling minimal, karena:¹⁷ a) Pemerintah lokal lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya. b) Keputusan pemerintah daerah sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat. c) Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Kehadiran desentralisasi dapat mendorong pertumbuhan pembangunan pada tingkat lokal. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga daerah secara mandiri membuka peluang terhadap keterlibatan masyarakat untuk dapat turut serta dalam merumuskan kebijakan publik. Seorang kepala daerah yang responsif tentunya mengutamakan komunikasi sebagai media penghubung antara pemimpin dengan masyarakatnya. Pembangunan di tingkat lokal harus dilakukan secara berkesinambungan. Ada empat aspek yang menjadi catatan penting bagi pemerintah lokal agar demokrasi berujung pada kesejahteraan rakyat. Keempat aspek itu adalah:¹⁸ a) Adanya pemberdayaan terhadap warga masyarakat tanpa adanya diskriminasi baik berdasarkan agama, etnis maupun kelompok tertentu. b) Terjadinya kerjasama dan interaksi dengan semua elemen lokal untuk menyusun kekuatan bersama. c) Menjamin terjadinya kesamarataan misal sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang. d) Terwujudnya rasa aman baik dari ancaman kejahatan fisik, represi maupun serangan penyakit.

Dalam perspektif desentralisasi, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan inovasi yang bermakna strategis bagi proses demokrasi lokal khususnya jika dikaitkan dengan upaya mewujudkan *good local governance* sebagai tujuan dari dijalankannya kebijakan desentralisasi. Secara normatif, pilkada langsung menawarkan

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 12

¹⁸Ridho Al-Hamdi, *Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah*, Center for Social and Public Policy Studies (CESDEP): Yogyakarta, 2011, Hal.335

sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal.

Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kemenangan Petahana

Demokrasi lokal di Kabupaten Kupang ditandai dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat setempat. Keikutsertaan masyarakat dalam mendukung salah satu pasangan calon merupakan bukti bahwa masyarakat memiliki harapan kepada calon kepala daerah yang dipilih agar dapat memperhatikan setiap segi kehidupan masyarakat. Kabupaten Kupang merupakan bagian dari provinsi NTT yang merupakan salah satu provinsi tertinggal di Indonesia. Oleh sebab itu masyarakat sangat mengharapkan sosok pemimpin yang tidak sekedar memberikan janji tetapi turut memberikan bukti kinerja yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Kupang.

Sebelum ada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ketika kepala daerah dipilih secara tidak langsung, hanya melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan, suara rakyat benar-benar tidak bermakna politik, karena rakyat ditempatkan dalam posisi apolitis melalui kebijakan depolitisasi massa. Suara rakyat dipinggirkan, begitu pula eksistensi lembaga perwakilan politik. Dengan pilkada langsung, pintu demokrasi diharapkan terbuka, tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi politik dan administratif bisa berpartisipasi mencalonkan diri menjadi pemimpin kepala daerah, dan rakyat yang menentukannya lewat pemilihan langsung.¹⁹

Pelaksanaan demokrasi dapat dilihat dari ada tidaknya pemilihan umum, seberapa besar ada persaingan di antara parpol, bagaimana perimbangan kekuasaan yang diperanka oleh lembaga-lembaga politik, serta ada tidaknya kesempatan dan jaminan sirkulasi elite politik dan kelanjutan sistem politik melalui reproduksi elite politik. Pilkada sebagai pembelajaran politik artinya siapa pun calon kepala daerah terpilih, semua pelaku demokrasi dapat menerimanya.²⁰

Pilkada langsung memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pemilihan dan sebagai penentu siapa yang akan menjadi pemimpin mereka selama lima tahun ke depan. Keberadaan calon petahana dalam pilkada langsung menunjukkan problematika yang kompleks. Sebagai orang yang

¹⁹ Siti Aminah, *Op.Cit*, Hal. 196

²⁰ *Ibid.*, Hal. 197

sedang menjabat terkadang petahana menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk mengamankan kedudukannya. Seharusnya petahana selama masa kepemimpinannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuannya melalui kinerja calon petahana.

Kemenangan petahana di Kabupaten Kupang tidak dapat dilepaskan dari implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan mekanisme yang berperan dalam meningkatkan partisipasi yang luas bagi masyarakat daerah dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dalam menangani permasalahan di daerah tetapi keputusan politik diambil oleh pemerintah daerah secara mandiri.

Dalam menangani permasalahan di daerah, Ayub Titu Eki selama kepemimpinannya selalu membangun komunikasi dengan masyarakat Kabupaten Kupang untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hasil dari pelibatan masyarakat dalam prospek pembangunan di Kabupaten Kupang maka terjadi peningkatan dalam kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai jawaban atas keinginan masyarakat. Berbicara tentang kinerja petahana selama kepemimpinannya maka ada beberapa capaian Ayub Titu Eki yang dipengaruhi oleh implementasi desentralisasi dan otonomi daerah sehingga menguatkan legitimasi masyarakat untuk kembali memilihnya pada masa jabatan bupati Kabupaten Kupang periode yang kedua.

Permasalahan utama dalam membangun daerah Kabupaten Kupang adalah kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini adalah pendidikan yang masih sangat rendah dan jumlah penduduk usia sekolah yang sangat minim, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kupang. pada awal kepemimpinannya, alokasi APBD kabupaten Kupang untuk pendidikan dinaikan mencapai 36% melebihi syarat minimal 20% sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Kebijakan yang dilakukan sejak dilantik pada periode pertama tahun 2009 adalah membangun unit sekolah baru disetiap dusun dan desa terpencil dimana banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengenyam bangku pendidikan. Banyak unit sekolah baru, baik SD, SMP, SMA dan SMK, tercatat 102 unit sekolah baru telah dibangun pada masa pemerintahan periode pertama. Tujuan

pengembangan yang dilakukan adalah memberikan kesempatan yang luas, mudah dan murah bagi masyarakat desa agar dapat menyekolahkan anak-anak mereka.

Kabupaten Kupang merupakan sebuah wilayah yang masih sangat minim dengan sarana prasarana kesehatan yang memadai, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Kupang. Selama kepemimpinan Ayub Titu eki menjadi kepala daerah telah meningkatkan jumlah sarana-prasarana kesehatan agar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kupang dapat menikmatinya. Peningkatan jumlah puskesmas, posyandu dan layanan kesehatan lainnya merupakan bagian penting dalam meningkatkan angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Kupang.

Dalam upaya pengembangan layanan kesehatan, pemerintah Kabupaten Kupang menggulirkan berbagai program perbaikan gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta kebijakan dan manajemen kesehatan. Belum terpenuhinya tenaga perawat dan bidan untuk ditempatkan di desa-desa. Membuat pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 2012 meminta desa-desa terpencil mengirimkan anak-anaknya yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan kebidanan dan keperawatan dan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Kupang.

Melalui program “Gerakan Tanam Paksa-Paksa Tanam” (GTPPT), yaitu gerakan ekonomi masal bagi masyarakat kabupaten Kupang yang dimulai pada Tahun 2009. Gerakan ini adalah sebuah program yang mewajibkan masyarakat untuk menanam aneka jenis tanaman perkebunan yang produktif tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri tetapi juga dapat dijual ke pasar. Melalui program ini masyarakat merasakan betul manfaat yang di dapat, keadaan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik karena keberadaan jenis tanaman yang dapat dijual untuk mendapatkan uang. Masyarakat tidak hanya menunggu pada masa pada musim hujan untuk bercocok tanam saja, tetapi masyarakat mulai berusaha menanam tanaman yang disesuaikan dengan kondisi cuaca Kabupaten Kupang.

Upaya Ayub Titu Eki dalam meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Kupang dan membuka ruang terisolasi bagi masyarakat yang berada di pedalaman Kabupaten kupang dan berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Pembukaan jalan poros tengah sepanjang 159,2 km dengan lebar 12 meter dimulai dari Lili ke Kecamatan Fatuleu hingga Kecamatan Amfoang Timur yang berbatasan langsung

dengan Negara Timor Leste. Tujuan pembukaan jalan poros tengah mengatasi keterisolasian masyarakat dan memperlancar transportasi barang dan jasa serta memacu pertumbuhan ekonomi diwilayah itu.

Pertumbuhan koperasi di Kabupaten Kupang pada tahun 2011 berjumlah 225 Koperasi, sedangkan tahun 2012 mengalami peningkatan 305 Koperasi. Pertambahan 80 koperasi berbadan hukum tersebut dengan jumlah anggotanya 19.355 orang, dengan total aset Rp. 21.291.611.596,00. Dukungan perbankan melalui KUR (kredit usaha rakyat) dari Bank BTN dengan bunga sangat rendah turut menumbuhkan berbagai usaha masyarakat Kabupaten Kupang.

Kemajuan besar yang terjadi semasa kepemimpinan Ayub Titu Eki tahun 2009-2013 adalah adanya peningkatan dalam sektor penerimaan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2009 termasuk Sabu Raijua belum dimekarkan dengan 30 kecamatan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Kupang adalah Rp. 16 miliar. Namun setelah 45 hari Sabu Raijua dimekarkan justru realisasi penerimaan PAD pada akhir tahun 2009 naik menjadi Rp. 23 miliar. Dari target Rp.17 miliar, terhitung sampai oktober 2010 PAD Kabupaten Kupang mencapai Rp. 30 miliar. Hingga tahun 2013 realisasi anggaran penerimaan mencapai Rp. 40 miliar,

Berbagai keberhasilan yang ditunjukkan petahana Ayub Titu Eki selama memimpin Kabupaten Kupang pada periode pertama menjadi bupati menunjukkan keberhasilannya dalam pembangunan di Kabupaten Kupang. Keberhasilannya tersebut semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sehingga kembali memilih Ayub Titu Eki bersama wakilnya Korinus Masneno untuk kembali memimpin Kabupaten Kupang pada periode yang kedua, tahun 2014-2019.

Desentralisasi sebagai sebuah sistem yang memberikan keuntungan terhadap petahana untuk kembali terpilih dalam periode kepemimpinan berikutnya terjadi manakala praktik desentralisasi di daerah memberikan ruang terhadap keterlibatan masyarakat untuk turut serta memberikan aspirasinya demi kelangsungan pembangunan di daerah. Dalam hal ini, masyarakat paling tahu apa yang menjadi permasalahan hidupnya dan apa yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah merupakan wujud tidak lanjut dari aspirasi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memadai. Kemenangan petahana dalam kancah politik lokal di daerah dapat dibaca sebagai kuatnya kepercayaan publik terhadap kinerja petahana. Namun masih terdapat calon petahana yang menggunakan cara-cara yang tidak adil sehingga menciderai prinsip demokrasi.

Segala bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh petahana dalam rangka mempertahankan kekuasaannya, dapat dihilangkan apabila calon petahana sadar akan kedudukannya sebagai sebuah tanggung jawab secara politis maupun dalam menjunjung tinggi moralitas. Petahana sebagai orang yang memiliki peluang untuk kembali terpilih, diharuskan selama masa kepemimpinannya dapat menjalankan sistem desentralisasi secara demokratis sehingga kepala daerah tersebut memiliki legitimasi yang semakin kuat dari masyarakat.

Ketika kepala daerah mampu berkinerja dengan baik dan memiliki kontribusi dalam menjawab permasalahan daerah, maka masyarakat pemilih tentunya akan mempertimbangkan pilihan politiknya kepada kandidat lain. Perumusan berbagai program kerja pemerintah yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat lokal merupakan prinsip demokrasi yang dapat memperkuat demokratisasi pada tingkatan lokal serta menunjang demokratisasi pada tingkatan nasional. Dibutuhkan komitmen dari setiap kepala daerah untuk menjamin bahwa proses pembangunan di daerah, haruslah mengutamakan partisipasi masyarakat sebagai dasar implementasi kebijakan yang disepakati bersama.

Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh kesimpulan bahwa, implementasi desentralisasi yang diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk dapat merumuskan berbagai program kerja yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dalam penerapannya pemerintah daerah hadir untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemenangan petahana dalam pemilihan kepala daerah dapat dilihat sebagai kuatnya kepercayaan publik terhadap kinerja petahana yang hanya dapat diwujudkan melalui implementasi desentralisasi agar tidak menciderai prinsip-prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti, 2014, *Kuasa Negara Pada Ranah Lokal*, Kencana: Jakarta.
- Bueno, Bruce, Alastair, Smith, 2005, *The Survival Politics* (*Budianto Suratno, Penerjemah*). Rosdakarya: Bandung.
- Firmanzah, 2012, *Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Haryatmoko, 2014, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
- Marijan, Kacung, 2006, *Demokratisasi di Daerah*, Pustaka Eureka & PusDeHAM: Surabaya.
- MZ, Hollyson, Rahmat dan Sundari, Sri, 2015, *PILKADA (Penuh euforia, Miskin makna)*, Bestari: Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo: Jakarta.

Artikel dan website:

- Al-Hamdi, Ridho, 2011, *Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah*, Center for Social and Public Policy Studies (CESDEP): Yogyakarta.
- Bahrul, Banani, Jurnal *Etika & Pemilu (Meneguhkan Netralitas, Mematri Imparsialitas)*, Vol. 1, Nomor 3, Oktober 2015.
- Basyarahil, Abubakar, *Desentralisasi, Pilkada Langsung dan Efektifitas Pemerintahan Daerah*.
- Onapajo, Hakeem, *Violence and Votes in Nigeria 2007: The Dominance of Incumbents in the Use of Violence to Rig Elections*.
- Marijan, Kacung, 2007, *Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Ekonomi dan Demokrasi Lokal*.
- Utami, Zamrud, 2010, *Pengaruh desentralisasi*, FE: UI.
- <http://akhmadfarhan.com/memahami-kemenangan-petahana-dalam-pilkada-dari-sudut-pandang-political-branding/>
- <http://fadilabidin75.blogspot.co.id/2013/05/peluang-petahana-dalam-pilkada.html>